



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/08/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
STRATEGI NASIONAL PENCATATAN SIPIL DAN STATISTIK HAYATI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap identitas hukum, status hukum, dan kepastian hukum, serta memastikan data peristiwa penting dan kependudukan menjadi basis perencanaan pembangunan, perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCATATAN SIPIL DAN STATISTIK HAYATI.**
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/08/2018
TANGGAL 24 AGUSTUS 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENCATATAN SIPIL DAN STATISTIK HAYATI

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretaris Negara.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : 1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas;
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
9. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

10. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan/Perdesaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan;
12. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri;
13. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
14. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama;
15. Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Kepala Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Kepala Bagian Perundang-undangan, Kementerian Dalam Negeri;
19. Kepala Sub Direktorat Mobilitas Penduduk, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Sub Direktorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik;
22. Kepala Sub Direktorat Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
23. Kepala Bidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. Kepala Bidang Materi Hukum Privat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan;
26. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;
27. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Perjanjian, Kementerian Agama;
28. Kepala Bagian Kerja Sama Lintas Sektoral dan Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

29. Kepala ...

29. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
30. Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
31. Jurist Tan, Kantor Staf Presiden;
32. Aditya Syarief, Kantor Staf Presiden;
33. Muhammad Abdul Hayyil Al Ayyubi, Fungsional Diplomat Pertama, Kementerian Luar Negeri;
34. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP, Kementerian PPN/Bappenas
35. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas
36. Hariyadi, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati